

## Penerapan Isak 335 pada Masjid yang Dikelola oleh Pemerintah yang Ada di Kota Bengkulu

Nurul Qomariah<sup>1</sup>, Abdullah<sup>2</sup>

Universitas Bengkulu

nurulqmrh29@gmail.com<sup>1</sup>, abduallah@unib.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the problems and obstacles in applying ISAK 335 in the financial reporting of the Bengkulu Government Mosque. The method used is a case study with a qualitative approach. This research collects data through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that government-run mosques in Bengkulu City, namely, At-Taqwa Grand Mosque, Baitul Izzah Grand Mosque, and Jamik Mosque have not implemented clear accounting standards and there is no routine supervision from the government and specific regulations regarding mosque financial management. The resulting financial reports are still simple and not by standards, potentially resulting in a lack of transparency and misuse of funds. This study recommends the need for training for mosque administrators, the creation of local regulations on mosque financial management, and regular supervision by the government to improve accountability and public trust. The limitation of this study is the lack of financial report data for two of the three mosques studied, which may affect the analysis results. The findings are expected to be the basis for improvements in mosque financial management in the future.*

**Keywords:** ISAK 335, Government Mosque, Non-Profit Organization

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan hambatan dalam penerapan ISAK 335 pada pelaporan keuangan Masjid Pemerintah Bengkulu. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang dikelola pemerintah yang ada di Kota Bengkulu yaitu, Masjid Agung At-Taqwa, Masjid Raya Baitul Izzah, dan Masjid Jamik belum menerapkan standar akuntansi yang jelas serta tidak adanya pengawasan rutin dari pemerintah dan regulasi spesifik mengenai pengelolaan keuangan masjid. Laporan keuangan yang dihasilkan masih sederhana dan tidak sesuai dengan standar yang berpotensi mengakibatkan kurangnya transparansi dan penyalahgunaan dana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan bagi pengurus masjid, pembuatan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan masjid, serta pengawasan berkala oleh pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data laporan keuangan dua masjid dari tiga masjid yang diteliti sehingga dapat mempengaruhi hasil analisis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan masjid di masa mendatang.

**Kata kunci:** ISAK 335, Masjid Pemerintah, Organisasi Nirlaba

## PENDAHULUAN

Kota Bengkulu merupakan ibu kota dari Provinsi Bengkulu. Wilayah Kota Bengkulu merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Kota Bengkulu merupakan Kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah 349.375 jiwa dari jumlah keseluruhan 369.269 jiwa (Kementerian Agama RI Provinsi Bengkulu, 2023). Agama Islam merupakan agama terbesar. Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam dan hadist sebagai tuntunan sunah kepada Nabi Muhammad saw. Penganut agama Islam disyariatkan untuk melaksanakan sholat lima waktu, puasa, zakat, dan menjalankan ibadah haji bila mampu sesuai dengan tuntunan rukun Islam. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid yang banyak sekali ditemui di Kota Bengkulu yang memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kemaslahatan umat. Masjid, sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat kegiatan ritual, tetapi juga lembaga mengatur aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi (Purba *et al.*, 2023). Dengan banyaknya jumlah masjid, penting bagi setiap masjid memiliki pengelolaan keuangan yang jelas dan akuntabel. Masjid akan lebih efektif melaksanakan kegiatan sosialnya jika pengelolaan keuangannya baik.

Masjid adalah lembaga keagamaan Islam yang merupakan salah satu organisasi sektor publik tidak berorientasi laba, juga dikenal *non profit organizations* (Syafitri *et al.*, 2023). *Non-profit organizations* atau organisasi nirlaba merupakan lembaga yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat atau lingkungan tanpa mencari keuntungan finansial (Mhd Reza Alfarizi, Arnida Wahyuni Lubis, 2024). Seperti halnya organisasi profit, masjid juga bertanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan keuangan dengan cara yang transparan dan akuntabel, karena penting bagi semua organisasi. Untuk entitas tidak memiliki tujuan mendapatkan laba seperti masjid, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan pedoman yang disebut Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 335). ISAK 335 muncul sebagai respons terhadap kebutuhan entitas non-profit untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan berkelanjutan. ISAK 335 memberikan pedoman mencatat dan melaporkan penerimaan, pengeluaran serta menyajikan laporan keuangan yang sesuai. Hal ini akan membantu masjid mengelola dana dan memastikan dana yang digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 335) menetapkan persyaratan laporan keuangan entitas nirlaba. Organisasi nirlaba penting untuk memiliki kewajiban dan hak menyusun serta melaporkan laporan keuangan kepada jamaah masjid. Berbagai pihak memiliki kepentingan pengambilan keputusan ekonomi yang biasanya menggunakan laporan keuangan berisi informasi keuangan organisasi. Masjid membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang baik dan efisien untuk menunjukkan bahwa pengelola masjid bertanggung jawab baik atas uang yang dikelola.

Di tengah maraknya pembangunan masjid di Bengkulu, sebuah temuan mengejutkan terungkap terkait pengelolaan keuangan masjid pemerintah yang ada di Kota Bengkulu. Temuan tersebut adalah masjid pemerintah yang ada di Kota

Bengkulu yang seharusnya menjadi contoh bagi masjid-masjid lain ternyata belum sepenuhnya menjalankan standar akuntansi yang berlaku. Masjid pemerintah menjalankan fungsi yang berbeda dibandingkan dengan masjid pada umumnya. Selain berperan sebagai sarana ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai simbol administrasi dan representasi identitas pemerintah. Laporan keuangan yang dibuat seharusnya sudah mengikuti standar. Tetapi faktanya, masjid yang dikelola pemerintah ini belum sama sekali mengikuti pedoman ISAK 335. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang standar akuntansi di kalangan pengelola masjid dan minimnya dukungan dari pemerintah dalam hal pelatihan dan sosialisasi mengenai ISAK 335.

Masjid biasanya bergantung pada donasi dan kotak amal sebagai sumber pendapatan utama. Sayangnya, pada masjid yang dikelola oleh pemerintah ini masih mengelola keuangannya secara sederhana, hanya dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran tanpa menggunakan sistem akuntansi yang lebih formal. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan sering kali kurang detail dan tidak mencerminkan kondisi keuangan masjid secara akurat. Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan masalah seperti kurangnya transparansi, kesulitan dalam melakukan perencanaan anggaran, dan bahkan penyalahgunaan dana.

Survey awal dilakukan pada masjid Raya Baitul Izzah. Masjid ini merupakan masjid yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Informasi didapatkan bahwa laporan keuangan pada masjid ini masih sama dengan masjid pada umumnya. Laporan keuangan pada masjid ini masih sebatas pendapatan dan pengeluaran. *Survey* kedua, dilakukan pada masjid Jamik yang merupakan masjid bersejarah di Kota Bengkulu. Laporan keuangan pada masjid ini sama halnya dengan masjid Raya Baitul Izzah belum sama sekali membuat laporan sesuai dengan standar. Terakhir, pada masjid Agung At-Taqwa. Masjid ini merupakan masjid dibawah naungan pemerintah Kota Bengkulu. Laporan keuangannya juga belum sesuai dengan standar akuntansi. Tetapi, laporan keuangan masjid ini baik dan teratur.

Penelitian Arista & Sumatera Utara Korespondensi Penulis (2023) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi ISAK 35 Organisasi Keagamaan 5 Masjid Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menunjukkan bahwa 5 masjid tidak menerapkan standar ISAK 35 ketika mereka menyusun laporan keuangannya. Selanjutnya, penelitian Diviana et al. (2020) dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi, menunjukkan hanya menyajikan laporan kas masuk dan keluar. Terakhir penelitian (Syafran et al., 2024) dengan tema Aplikasi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menunjukkan hanya satu masjid yaitu Masjid Ashobirin telah menerapkan PSAK No. 45. Sementara itu, enam masjid lainnya belum sesuai PSAK No. 45.

Masjid merupakan baitullah (Rumah Allah swt.) yang menjadi pusat ibadah bagi umat Islam. Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi,

pengurus masjid perlu melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan mereka agar sepenuhnya mengacu pada ISAK 335. Tujuannya adalah untuk menjadikan laporan keuangan masjid lebih akurat, relevan, dan dapat diandalkan selain meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan masjid. Laporan keuangan masjid yang dibuat sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 335) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid transparan dan akuntabel. Namun, kenyataannya penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan masjid masih belum optimal dan butuh banyak perhatian. Hal ini terbukti pada beberapa penelitian terdahulu di atas.

## TINJAUAN LITERATUR

### A. Konsep Akuntansi Sektor Publik

Konsep akuntansi sektor publik mencakup prinsip, standar, dan pendekatan yang dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik. Hal ini penting karena organisasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor swasta, termasuk tujuan utama yang berfokus pada pelayanan masyarakat dibandingkan dengan keuntungan finansial (Risakotta *et al.*, 2023).

#### 1. Definisi dan Ruang Lingkup

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh organisasi yang bertujuan untuk tidak mendapatkan laba. Organisasi ini seperti, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan. Akuntansi sektor publik dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama:

- a. Akuntansi Komersial, yang berfokus pada organisasi yang bertujuan menghasilkan laba.
- b. Akuntansi Pemerintahan, yang berfokus pada entitas pemerintah.
- c. Akuntansi Sosial, berorientasi pada kegiatan ekonomi di tingkat makro, seperti laporan keuangan negara (Indra, 2019).

#### 2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual digunakan untuk memastikan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Basis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. SAP juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, termasuk evaluasi kinerja dan penyusunan kebijakan berbasis data (Parinding *et al.*, 2023).

#### 3. Konsep Nilai Uang (*Value for Money*). Konsep ini mendasari pengelolaan sektor publik pada tiga elemen utama:

- a. Ekonomi. Penggunaan sumber daya dengan biaya terendah.
- b. Efisiensi. Penggunaan sumber daya secara optimal.
- c. Efektivitas. Pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sektor publik menggunakan konsep ini sering dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama (Murwarni & Astuti, 2023). Pengukuran ini dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi sektor publik, seperti lembaga pemerintahan, organisasi non-profit, atau institusi pelayanan masyarakat, mampu mencapai tujuan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada transparansi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

#### 4. Pentingnya Akuntansi Sektor Publik

Pentingnya akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas manajemen sektor publik. Dalam akuntansi sektor publik, penggunaan praktik akrual membantu pemerintah untuk mengakui transaksi pada saat terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Ini memungkinkan penyajian informasi yang lebih akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan kebijakan publik. Jurnal-jurnal terbaru menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik juga dapat meningkatkan manajemen sumber daya dan mendukung kontrol internal yang efektif untuk mencegah penyelewengan dan penipuan (Meilisa Amalia, 2023).

### **B. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 335)**

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 3335 merupakan pedoman yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membantu entitas berorientasi non laba dalam menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Sebelumnya, nama ISAK 335 adalah ISAK 3. Akan tetapi, ada perubahan nomor yang bertujuan untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali angka 1 dan 2) dan tidak seperti IFRS Accounting Standards (diawali angka 3 dan 4) (IAI Global, 2020). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan perubahan nomor pedoman ini menjadi ISAK 335 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

ISAK 335 memberikan interpretasi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 paragraf 5 tentang penyajian laporan keuangan, khususnya bagi organisasi yang tidak bertujuan mencari laba, seperti lembaga keagamaan, yayasan, lembaga sosial, dan badan amal. ISAK 335 menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang relevan dan dapat dipahami oleh para pemangku

kepentingan. Standar ini memungkinkan organisasi non laba untuk mengadaptasi deskripsi dan klasifikasi dalam laporan keuangan agar sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan minimal isi laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan. Sebagai contoh, jika entitas berorientasi non laba menerima sumber daya yang mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat atau dengan syarat tertentu, entitas tersebut dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu apakah pemberi sumber daya memiliki pembatasan atau tidak (Pinnarwan *et al.*, 2018).

Pedoman ini mencakup pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan sumber daya organisasi secara rinci, sehingga laporan keuangan tidak hanya mencerminkan posisi keuangan tetapi juga memberikan informasi terkait penggunaan dana sesuai tujuan. Dengan demikian, ISAK 335 membantu memastikan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh entitas non laba dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti donatur, pemerintah, dan masyarakat umum. Selain memberikan transparansi, penerapan ISAK 335 juga mendukung akuntabilitas organisasi non laba, karena laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar ini menjadi alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang diterima.

### C. Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki tujuan non-komersial (Siahaan *et al.*, 2023). Menurut Salamon & Anheier (1997) organisasi nirlaba beroperasi untuk memberikan layanan publik, menciptakan nilai sosial, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi nirlaba dapat dimiliki sektor swasta atau pemerintah dan melakukan pekerjaan amal tanpa keuntungan (Hutagalung & Purba, 2022). Tujuan utama organisasi ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung isu-isu sosial tanpa orientasi laba. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan dalam ISAK 335 bahwa organisasi nirlaba dapat memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan. Lembaga ibadah, organisasi sosial masyarakat (LSM), organisasi kesehatan, dan lembaga pendidikan adalah contoh organisasi nirlaba (Simbolon & Purba, 2022). Karena seluruh aktivitas organisasi pada dasarnya dilakukan dari, oleh, dan untuk manusia sehingga sumber daya manusia adalah aset paling berharga bagi organisasi non-laba (Sahala Purba *et al.*, 2022). Tujuan laporan keuangan entitas nirlaba adalah untuk memberikan informasi kepada anggota, kreditur, dan pihak lainnya (Ade *et al.*, 2022). Untuk mempertahankan aset, perlunya pencatatan dan pembukuan agar dapat melacak dan mengawasi transaksi yang menambah atau mengurangi kekayaan dan kewajiban (Silmi Mursidah *et al.*, 2023). Kelangsungan hidup organisasi nirlaba bergantung pada pengelolaan keuangan efektif. Laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan dan aktivitas, harus dibuat sesuai standar akuntansi relevan, seperti ISAK 335. Organisasi nirlaba sering menghadapi tantangan seperti;

1. Ketergantungan pada sumbangan yang dapat membuat organisasi rentan terhadap fluktuasi ekonomi
2. Sumber daya manusia yang terbatas dalam hal pelatihan dan kapasitas pengurus dalam pengelolaan keuangan.

#### D. Masjid Pemerintah

Masjid yang dikelola oleh pemerintah merupakan aset sosial dan keagamaan yang keberadaannya sangat penting dalam mendukung kebutuhan spiritual masyarakat. Pengelolaan masjid oleh pemerintah biasanya mencakup aspek administrasi, operasional, serta pemeliharaan fisik dan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh masjid digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tercatat secara transparan. Masjid yang dikelola pemerintah dapat berfungsi sebagai ibadah (*mdlahah*), tempat ibadah secara luas (*ghairu madhlah*), dan wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang tersedia serta juga dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat (Lating, 2022).

Masjid-masjid yang dikelola oleh pemerintah memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat. Di Kota Bengkulu, keberadaan masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas religius dan penggerak pembangunan moral masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan masjid yang dikelola oleh pemerintah, penerapan standar akuntansi yang tepat sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. ISAK 335 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335) menjadi pedoman yang relevan dalam penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, termasuk masjid karena menciptakan laporan dengan sangat sistematis dan mendalam serta detail (Tanan & Bali, 2023).

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan ISAK 335 pada pengelolaan keuangan masjid pemerintah Bengkulu. Menurut (Sugiyono, 2022), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih komprehensif tentang praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak masjid, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan standar akuntansi yang relevan.

### 2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Masjid Pemerintah yang ada di Kota Bengkulu yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi jamaah. Subjek penelitian meliputi pengelola masjid yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta tokoh agama seperti imam dan khatib. Pengelola masjid dipilih karena mereka memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat diketahui lebih jelas permasalahan alasan belum menerapkan ISAK 335.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi laporan keuangan masjid. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola masjid untuk menggali informasi mengenai proses pengelolaan keuangan, mengetahui permasalahan dan hambatan mengapa masjid yang dikelola oleh pemerintah ini belum menerapkan ISAK 335 serta harapan mereka terhadap standar akuntansi tersebut. Wawancara ini juga bertujuan untuk memahami perspektif pengelola mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Observasi langsung dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan keuangan di masjid, termasuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Observasi ini penting untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif tentang praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan. Selain itu, studi dokumentasi laporan keuangan masjid juga dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 335 tercermin dalam laporan keuangan yang disusun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan permasalahan dalam penerapan ISAK 335 pada tiga masjid yang dikelola oleh pemerintah di Kota Bengkulu, yaitu Masjid Agung At-Taqwa, Masjid Raya Baitul Izzah, dan Masjid Jamik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan beberapa temuan penting yang merangkum kondisi masing-masing masjid:

#### 1. Masjid Agung At-Taqwa

Masjid Agung At-Taqwa adalah salah satu masjid ikonik di Kota Bengkulu. Masjid ini didirikan oleh Bapak Soeprapto yang merupakan Gubernur ke-3 Provinsi Bengkulu. Selain itu, masjid ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Juli 1989. Berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat setempat. Pembangunan masjid ini berawal dari kebutuhan akan sebuah Masjid Agung di Kota Bengkulu. Sebelum dibangun menjadi masjid, lokasi ini sebelumnya merupakan bangunan rumah sakit.

Masjid Agung At-Taqwa memiliki arsitektur mencolok dan menarik perhatian, menyerupai istana kolonial dengan taman yang luas dan penataan yang mengingatkan pada taman di halaman istana kepresidenan.

(Serviani *et al.*, 2024). Tetapi, dalam hal pengelolaan keuangan, masjid ini menyusun laporan keuangan tanpa menggunakan standar akuntansi tertentu. Meskipun begitu, pencatatan laporan keuangan masjid ini baik dan tertata. Laporan keuangan masjid ini tidak diperiksa oleh pemerintah, dan tidak ada regulasi yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan dilakukan menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Excel, dengan pendapatan dan pengeluaran secara global diumumkan setiap Jumat. Pengurus masjid tidak pernah menerima pelatihan atau sosialisasi terkait keuangan dari pemerintah.

Struktur organisasi masjid telah disahkan dengan SK Wali Kota. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan dari pemerintah hanya berupa pembayaran tagihan air, listrik, dan honor karyawan, tetapi dana langsung diberikan oleh yang bersangkutan tidak dikelola oleh masjid. Audit internal dilakukan secara mandiri, dan pengurus terlibat penuh dalam musyawarah terkait laporan keuangan. Semua transaksi dicatat dengan bukti fisik. Masjid Agung At Taqwa juga memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi, keberadaannya memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi terkait (Serviani *et al.*, 2024).

## 2. Masjid Raya Baitul Izzah

Masjid Raya Baitul Izzah merupakan masjid terbesar kedua di Bengkulu berlokasi di jalan Asahan, Padang Harapan Kota Bengkulu (Hanan *et al.*, 2018). Masjid ini berlokasi di Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Masjid ini dibangun karena belum adanya masjid raya di Bengkulu. Pada saat itu, masjid ini dinamakan masjid Padang Harapan. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1976, pada masa pemerintahan Gubernur Drs. A. Chalik, dan diresmikan pada tahun 1979 oleh Wakil Presiden H. Adam Malik.

Masjid Raya Baitul Izzah telah menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat Bengkulu sejak diresmikan pada tahun 1979. Namun, dalam hal mengelola keuangannya juga masjid ini tidak memiliki aturan khusus terkait pembuatan laporan keuangan. Pemerintah juga tidak memeriksa laporan keuangan masjid ini serta tidak ada aturan pemerintah yang mengatur tentang laporan keuangan masjid. Masjid ini hanya membuat laporan keuangan yang sederhana sebatas laporan pendapatan dan pengeluaran. Bantuan dari pemerintah langsung diberikan kepada petugas masjid, seperti petugas kebersihan, petugas keamanan dan imam, tanpa melalui pengurus masjid. Ketika ada rapat terkait keuangan, hanya pengurus inti yang terlibat dalam membahas laporan keuangan. Berdasarkan wawancara, masjid ini tidak ada bukti transaksi yang lengkap.

Meskipun wawancara di Masjid Raya Baitul Izzah berhasil dilakukan. Namun, pengurus masjid enggan memberikan rincian laporan keuangan

dengan alasan keamanan dan kerahasiaan data. Hal ini menunjukkan bahwa masalah transparansi dan akuntabilitas keuangan masih menjadi kendala di masjid tersebut. Pengurus lebih memilih untuk menjaga kerahasiaan laporan keuangan dan hanya memberikan informasi terbatas. Keterbatasan ini memperlihatkan bahwa ada kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan informasi, meskipun hal ini juga menghambat penerapan standar akuntansi yang lebih baik.

### 3. Masjid Jamik

Masjid Jamik adalah masjid bersejarah yang ada di Bengkulu. Awalnya merupakan milik masyarakat setempat, namun dianggap penting oleh pemerintah sehingga dimasukkan dalam program pelestarian cagar budaya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010. Meskipun secara hukum dimiliki oleh negara, namun pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat lokal. Masjid ini berlokasi di Jalan Letjend Soeprapto, Tengah Padang, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu. Masjid Jamik Bengkulu memiliki denah persegi mengikuti bentuk denahnya yang memiliki 3 tingkatan yang melambangkan Imam, Islam, dan Ihsan (Hanan *et al.*, 2018).

Pendiri Masjid Jamik adalah seorang bangsawan Bugis bernama Daeng Makulle. Ia datang ke Bengkulu dan diterima oleh elite lokal, khususnya dari Sungai Lemo, yang kemudian memberikan sebidang tanah yang luas, meliputi daerah dari Pendakian, Kampung Kelawi, Pengantungan, hingga Pintu Batu. Setelah tanah dibersihkan, wilayah tersebut dinamakan Tengah Padang. Daeng Makulle kemudian diangkat oleh Pangeran Jung Lemo sebagai kepala dagang di Tengah Padang.

Karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat itu, didirikanlah tempat ibadah yang dikenal sebagai Masjid Jamik. Nama "Masjid Jamik" merujuk pada syariat Islam bahwa, jumlah jamaah setidaknya berjumlah 40 jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat (khususnya). Seiring berjalannya waktu, masjid ini menjadi pusat ibadah bagi masyarakat sekitar, termasuk kampung-kampung terdekat.

Pada masa pemerintahan Bung Karno (1938-1942), ketika beliau tinggal di Hotel Centrum yang tidak jauh dari Masjid Jamik, beliau merasa bahwa masjid ini perlu direnovasi karena kondisinya yang kurang layak. Meski sempat mendapat penolakan dari beberapa ketua, Bung Karno tidak menyerah setelah mendapat dukungan dari istrinya, Inggit Garnasih. Dengan bantuan pemuda dari Perguruan Taman Siswa dan Muhammadiyah, renovasi masjid dimulai dengan sistem gotong royong. Sebagai bagian dari kontribusi, gaji Bung Karno pada waktu itu, yang sebesar 150 gulden dan 1 guldennya disumbangkan untuk pembangunan masjid.

Masjid Jamik memiliki sejarah dan kontribusi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun begitu, masjid ini masih banyak terdapat

kendala dalam has menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Pengelola masjid menyatakan bahwa laporan keuangan yang mereka susun tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan hanya disusun secara sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Word, dan yang dicatat hanya pendapatan dan pengeluaran yang diumumkan setiap hari Jumat. Pengurus masjid mengaku bahwa laporan keuangan disusun untuk memberikan transparansi kepada jamaah, dengan cara menempelkan laporan tersebut di papan pengumuman masjid.

Selain itu, pengelola masjid juga mengungkapkan bahwa belum ada pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Pemerintah memang memberikan bantuan fisik seperti bangunan, tetapi tidak memberikan dana operasional maupun dukungan dalam bentuk pelatihan keuangan. Masjid Jamik juga tidak memiliki audit internal, dan pengelolaannya masih bergantung pada pemahaman pengurus masjid tentang pentingnya laporan keuangan yang mudah dipahami oleh jamaah, meskipun tidak mengikuti standar akuntansi yang formal. Namun, Masjid Jamik Kota Bengkulu tetap menjadi destinasi wisata religi yang memiliki citra yang baik, baik dalam aspek kognitif (*cognitive destination image*) maupun afektif (*affective destination image*) (Sakinah *et al.*, 2024), menambah daya tariknya sebagai tempat yang tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga menjadi simbol sejarah dan kebudayaan yang kaya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masjid-masjid yang dikelola oleh pemerintah di Kota Bengkulu, yaitu Masjid Agung At-Taqwa, Masjid Raya Baitul Izzah, dan Masjid Jamik, belum sepenuhnya menerapkan ISAK 335 dalam pengelolaan laporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus masjid tentang pentingnya penerapan standar akuntansi yang sesuai serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Selain itu juga tidak adanya pengawasan dari pemerintah terkait keuangan.

## SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan penerapan ISAK 335 pada masjid yang dikelola oleh pemerintah di Kota Bengkulu yang seharusnya menjadi contoh bagi masjid-masjid lain.

1. Pengurus masjid perlu diberikan pelatihan dan bimbingan tentang pentingnya penerapan standar akuntansi yang sesuai, terutama ISAK 335, agar pengelolaan keuangan masjid lebih transparan dan akuntabel.

2. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan masjid, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, sehingga laporan keuangan masjid dapat disusun dengan lebih baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Penting bagi pengurus masjid untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan laporan yang lebih lengkap dan terbuka kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan, sehingga menjadi contoh yang baik dalam hal pengelolaan keuangan yang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, R., Mochtar, F., & Saputra, D. (2022). Analysis of Implementation of Isak 35 At Madrasah X City of Pekanbaru. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6 no.3(3), 2685–5607.  
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/Bilancia/index>
- Arista, R., & Sumatera Utara Korespondensi Penulis, U. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Isak 35 Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus 5 Masjid Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan). *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(5).  
<https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i4.504>
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>
- Hanan, I. F., Purnomo, A. B., Trisakti, D. U., Rejang, R., & Pustaka, S. (2018). Implementasi Kearifan Lokal Arsitektur Tradisional Rumah. *Seminar Nasional Ceniawan Ke-4 Tahun 2018*, 379–384.
- Hutagalung, D., & Purba, S. (2022). Application of Financial Statements of Non-Profit Organizations based on ISAK 35 at the Indonesian Methodist Church in Reinata Resort (GMI Reinata). *Asian Journal of Applied Business and Management*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v1i2.1940>
- IAI Global. (2020). *Ikatan Akuntan Indonesia Global*. 1, 1–10. [iaiglobal.or.id/pada](http://iaiglobal.or.id/pada) 12 Desember pukul 20.43 WIB.
- Indra, B. (2019). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 1–52.
- Kementerian Agama RI Provinsi Bengkulu. (2023). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut Se- Provinsi Bengkulu*. <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-yang-dianut-se-provinsi-bengkulu/pada> 18 Oktober pukul 23.15 WIB.

- Lating, A. I. S. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Masjid Sesuai ISAK No. 35 Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. *Owner*, 7(1), 489–511. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1222>
- Meilisa Amalia, M. (2023). Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices. *The Es Accounting and Finance*, 1(03), 160–168. <https://doi.org/10.58812/esaf.v1.i03>
- Mhd Reza Alfarizi, Arnida Wahyuni Lubis, N. (2024). Analisis Peneparan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan entitas Berorientasi Nonlaba. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(35), 2508–2521.
- Murwarni, A. S., & Astuti, R. P. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Parinding, S., Sari, N., & Dasila, R. A. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.4198>
- Pinnarwan, D., Handaya, D. S., Leo, L., Wijaya, I., Wijayana, S., Palilingan, F., Wahyuni, E. T., Herlianto, A., Warsidi, N. S., Yunirwansyah, Shauki, E. R., & Supriyono. (2018). ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba. In *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Purba, S., Aji Sitohang, S., Antheresya Butar Butar, E., Delima Hutagalung, D., Mastaria Sitanggung, E., Imelda Simbolon, S., Gracella, S., Manullang, N., & Natalia, V. (2023). Pengimplementasian ISAK 35 Pada Laporan Keuangan Organisasi Non. *04(02)*, 113–121. <https://doi.org/10.54147/jpkm.v4i02>
- Risakotta, K. A., Harmadji, D. E., Putra, D. G., Winarni, D., Sopanah, A., Murni, Y., Adelina, C., Payamta, & Rachmani, F. A. (2023). Akuntansi Sektor Publik. In R. N. Ilham (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik*. Eureka Media Aksara.
- Sahala Purba, Tobing, D., Tambunan, H., Siagian, L., & Elmawati, R. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Di Gereja HKBP Pangaribuan. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(1), 01–09. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i1.70>
- Sakinah, I., Sunarto, A., & Shar, A. (2024). Image Analysis Of Religion Tourism Destinations In Bengkulu City Analisis Citra Destinasi Wisata Religi “Religion Tourism” Di Kota Bengkulu. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 456–467.
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1997). *Defining the nonprofit sector*. Manchester University Press. Inggris.

- Serviani, Rahayu, S., & Afrianty, N. (2024). Peran Wisata Religi Brendo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Kota Bengkulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(6), 559–569.
- Siahaan, E. S. R., Nurlaila, N., & Sudiarti, S. (2023). Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan Isak No.35 Pada Masjid Di Kota Medan (Studi Kasus Masjid Al-Ihsan Jalan Suluh). *Sebatik*, 27(2), 517–524. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2311>
- Silmi Mursidah, Yenni Samri Juliati Nasution, & Laylan Syafina. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: ISAK 35 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 232–245. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1907>
- Simbolon, S. I., & Purba, S. (2022). Application of ISAK 35 concerning Financial Statements of Non-profit Organizations at the HKBP Bolon Pangururan Church. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v1i1.1806>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *Alfabeta*. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syafitri, A., Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 31–40. <https://doi.org/10.32939/dhb.v4i1.1539>
- Syafran, L. O., Safri, I., & Wahyudi, S. (2024). Implementasi Penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 45 Pada Laporan Keuangan Masjid Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 4759–4765.
- Tanan, E. H. P., & Bali, A. S. (2023). Penerapan Isak No. 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Nurul Hayat Lewolang. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 8–17. <https://doi.org/10.33366/ref.v10i2.3364>